

EKOLOGI POLITIK

Arif Satria

Berbagai masalah sumberdaya alam yang muncul, baik di laut, udara, dan darat, selama ini sering dipahami sebagai masalah teknis. Implikasinya adalah bahwa solusi-solusi yang diberikan pun bersifat teknis. Ketika terjadi pencemaran sungai akibat proses produksi oleh industri pertambangan, maka yang dicari adalah solusi teknis dengan menemukan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Begitu pula untuk kegiatan konservasi. Ketika stok ikan menurun, dan terumbu karang sudah rusak, maka yang dikembangkan adalah solusi teknis bagaimana merehabilitasi terumbu karang serta menjaga terumbu karang yang masih baik melalui pengembangan daerah perlindungan laut (*marine protected area*). Berbagai kawasan konservasi kemudian dikembangkan, baik berupa taman nasional, taman wisata alam, maupun suaka alam. Apakah solusi-solusi teknis tersebut salah?

Tentu jawabannya tidak. Namun, selama masalah sumberdaya dipahami sebagai masalah teknis, maka solusinya pun akan selamanya bersifat teknis. Tentu saja solusi teknis tidak salah dan bahkan sangat dibutuhkan. Namun pertanyaannya adalah apakah solusi teknis atas persoalan sumberdaya alam akan selalu efektif dan tidak membawa masalah baru? Apakah ketika pemerintah memberikan solusi dengan mengembangkan taman nasional laut maka masalah sumberdaya laut bisa selesai begitu saja dan tidak menimbulkan masalah baru bagi nelayan? Bagaimana aturan-aturan di taman nasional dibuat? Siapa yang terlibat dalam pembuatan, pengesahan, dan penegakan aturan-aturan tersebut? Sejauh mana akses nelayan dan masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyusunan aturan-aturan pengelolaan kawasan konservasi? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh adanya aturan-aturan tersebut?¹

Begitu pula untuk kasus pasir laut. Ketika isu kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut muncul pada awal tahun 2003, siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Apakah keuntungan yang dinikmati pengusaha pasir laut dan pemerintah merupakan *trade off* dengan marginalisasi nelayan? Apakah juga pernah terpikirkan bahwa kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut adalah akibat ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara nelayan, pengusaha pasir laut, dan negara?

Beberapa contoh di atas menggambarkan bahwa ternyata persoalan sumberdaya alam tidak semata persoalan teknis. Ternyata ada masalah-masalah sosial-politik berkaitan dengan akses pemanfaatan dan kontrol atas sumberdaya alam. Terbatasnya akses masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan maupun mengelola sumberdaya hutan, telah menyebabkan mereka marjinal; tidak saja karena tidak bisa menikmati keuntungan ekonomis, tetapi juga sebagai korban utama apabila terjadi degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan oleh pihak luar (baca: swasta) yang telah mendapat ijin dari negara.

Mencermati persoalan sumberdaya alam sebagai persoalan sosial-politik itulah yang menjadi fokus dari pendekatan ekologi politik (*political ecology*). Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Ada asumsi pokok dalam ekologi politik bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, melainkan merupakan suatu bentuk *politized environment* dimana banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global (Bryant 2001). Tujuan dari ekologi politik tidaklah semata sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan, tetapi juga merupakan pijakan penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi politik dapat menjadi pendekatan baru dalam memahami isu-isu maupun dalam formulasi kebijakan kelautan dan perikanan.

KONSEP POKOK

Ekologi politik mulai berkembang sejak akhir dekade 1970an dan awal 1980an. Namun demikian istilah ekologi politik sendiri pertama kali dicetuskan oleh Russett (1967), Eric Wolf (1972), Miller (1978), Cockburn dan Ridgeway (1970). Bukan berarti sebelum itu belum ada kajian terhadap kaitan antara politik dan ekologi. Pada tahun 1960an kajian ekologi sudah mulai memasukkan aspek politik, khususnya yang terkait dengan tumbuhnya minat terhadap pengaruh manusia terhadap lingkungan biofisik. Istilah ekologi sendiri sebenarnya merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Sebagai bidang ilmu pengetahuan, ekologi bertujuan untuk memberikan ilustrasi hubungan antara manusia dengan spesies lainnya. Perubahan lingkungan juga lalu dilihat sebagai hasil hubungan antara manusia dan spesies lainnya (Forsyth 2003). Tapi selanjutnya pengembangan ekologi tergantung pada pendekatan baru yang menekankan agenda politik yang mempertanyakan rusaknya perilaku manusia, sehingga mengkaji ekologi akan inheren bersifat politis (Forsyth 2003: 5). Forsyth (2003) juga menjelaskan bahwa ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian ekologi budaya (*cultural ecology*). Hal ini bisa dilihat dari kajian-kajian *cultural ecology* tahun 1960an. Ini didasarkan pada kutipan terhadap karya Netting (1993), yang mengatakan bahwa *cultural ecology* memfokuskan diri pada "particular circumstances of geography, demography, technology, and history that result in a splendid variety of cultural values, religion,

kinship systems, and political structures in local environmental strategies". Lalu apa bedanya dengan ekologi politik? Secara umum, ekologi politik memfokuskan diri pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan, sementara ekologi budaya lebih fokus pada fenomena yang lebih lokal dan pada pengelolaan lahan yang dikondisikan secara budaya (Forsyth 2003). Memang pada akhirnya ekologi politik merupakan perhatian dari berbagai disiplin ilmu. Pada awalnya ekologi politik bersumber dari antropologi kemudian melebar ke ekonomi politik, geografi, dan ilmu politik, yang pada perkembangannya antar disiplin ilmu itu sendiri juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap istilah ekologi politik. Orang geografi menganggap bahwa ekologi politik berakar di bidang *political geography*. Sementara bidang ilmu politik juga menganggap bahwa ekologi politik berakar dari ilmu politik.

Banyak sekali definisi dan penjelasan tentang ekologi politik ini. Dilihat struktur frasenya, ekologi politik mengkombinasikan perhatian pada ekologi dan ekonomi-politik secara luas, yang mencakup dialektika antara masyarakat dengan sumberdaya, dan juga dialektika dalam kelas dan grup dalam masyarakat itu sendiri (Blaikie dan Brookfield dalam Forsyth 2003). Satu konsep definisi yang diterima banyak ahli adalah bahwa ekologi politik merupakan "*the social and political conditions surrounding the causes, experiences, and management of environmental problem*" (Forsyth 2003). Namun demikian, sebenarnya ada beberapa pendekatan dalam menjelaskan pengertian ekologi politik sebagaimana ditulis Forsyth (2003):

- a) *Environmental problems as the phenomenological interaction of biophysical process, human needs, and wider political system.*
- b) *Both a set of theoretical propositions and ideas on the one hand and on the other a social movement referred to as the ecology movement.*
- c) *The interactive interdependence among sphere: the individual, the community, the natural world, and the national society.*
- d) *A more specific analysis of Marxist debates about materialism, justice, and nature in capitalist societies, with the view to achieving a fairer distribution of rights and resources.*
- e) *Inquiry into the political forces, conditions, and ramifications of environmental change; location specific aspects of ecological change; and the effects of environmental change on socio-economic and political relationship.*
- f) *A debate focuses on interactions between the state, non-state actors, and the physical environment, whereas "environmental politics" as a debate concerns the role of the state generally.*

Berbagai pendekatan tersebut merupakan representasi dari bidang kajian yang berbeda-beda. Ekologi politik memiliki kaitan erat dengan bidang-bidang lainnya seperti *cultural ecology, human ecology, ecological anthropology, ecological economics, radical development geography and environmental history*. Apa bedanya *political ecology, cultural ecology, cultural materialism, social ecology, dan environmental politics*? Ekologi politik memfokuskan diri lebih pada penjelasan politik

dari degradasi dan perubahan lingkungan, sementara ekologi budaya lebih fokus pada praktek-praktek pengelolaan sumberdaya yang dibangun secara budaya dan lokal. Sementara itu materialisme budaya (*cultural materialism*) berkembang sebagai respon terhadap ekologi budaya. Elemen dasar dalam materialisme budaya adalah lingkungan, masyarakat, budaya, dan adaptasi. Ada tiga aspek dalam pola adaptasi sosial budaya, yaitu pola-pola ekologi, struktur sosial, dan ideologi. Pola-pola ekologi merupakan cara bagaimana orang memenuhi kebutuhan materialnya di dalam lingkungannya, yang kemudian dapat dibagi menjadi dua macam, yakni *technoenvironmental aspect* dan *demography*. Perbedaannya dengan ekologi politik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Materialisme Budaya dengan Ekologi Politik

Unsur	Materialisme Budaya	Ekologi politik
Lingkungan	Lingkungan fisik dan biologis	Termasuk masyarakat
Masyarakat	Masyarakat sebagai kelompok yang terisolasi dan homogen	Masyarakat sebagai kelompok yang berinteraksi dan heterogen
Budaya	Homogen	Heterogen
Sifat Perubahan	Evolusi	Melihat pada pembuatan keputusan individual, konflik, dan perubahan sejarah
Metode	Kuantitatif dengan fokus pada lingkungan	Kuantitatif dan kualitatif dengan fokus pada ekonomi, politik, dan lingkungan

Sumber: anonim

Sementara antara ekologi politik dan politik lingkungan (*environmental politics*) yang seringkali dipersamakan itu ternyata menurut Bryant dan Bailey (2001) memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Politik lingkungan merupakan bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah lingkungan, yakni meneliti dampak isu lingkungan terhadap proses politik formal serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Jadi, perhatian utama kajian ini adalah "*only considers the environment in so far as it intrudes on the formal political process*" (Bryant dan Bailey 2001). Karena itulah, politik lingkungan dianggap berperspektif teknosentrik daripada ekosentrik, sehingga kaitannya dengan ekologi politik tidak terlalu kuat (lihat Tabel 2).

Apa yang diungkapkan Bryant dan Bailey (2001) di atas menggambarkan bahwa meskipun istilah ekologi politik merupakan proses panjang dari kajian ekologi budaya (*cultural ecology*), namun saat ini seolah merupakan bidang kajian geografi. Memang benar bahwa dalam *Journal of Political Geography* kajian ekologi politik mendapat tempat. Namun demikian kalau ditelaah dari literatur ilmu politik serta ekonomi politik, nampaknya ekologi politik pun seolah juga merupakan bidang kajian mereka. Bahkan Forsyth (2003) yang menaruh perhatian sangat besar terhadap perspektif kritis pun masih menggunakan istilah politik lingkungan dalam mendefinisikan ekologi politik. Beragamnya pendekatan tersebut sebenarnya semakin memperkaya kajian ekologi politik itu sendiri. Sehingga perbedaan-perbedaan seperti itu mesti dilihat

sebagai upaya pengkayaan kajian ekologi politik ketimbang sebagai sesuatu yang saling meniadakan.

Tabel 2. Karakteristik Bidang Kajian Lingkungan

Bidang	Disiplin	Tema Pokok	Afinitas dengan Ekologi Politik Dunia Ketiga	Paradigma
Ekologi Budaya (<i>Cultural Ecology</i>)	Anthropologi	Adaptasi budaya terhadap lingkungan	Kuat	Ekosentrik
Ekologi Ekonomi (<i>Ecological Economics</i>)	Ilmu Ekonomi	Integrasi ekonomi dan ekologi (radikal)	Kuat	Ekosentrik
Ekonomi Lingkungan (<i>Environmental Economics</i>)	Ilmu Ekonomi	Integrasi ekonomi dan ekologi (<i>mainstream</i>)	Lemah	Teknosentrik
Sejarah Lingkungan (<i>Environmental History</i>)	Ilmu Sejarah	Sejarah interaksi manusia-lingkungan	Sedang	Ekosentrik
Manajemen Lingkungan (<i>Environmental Management</i>)	Geografi	Manipulasi lingkungan yang terencana	Lemah ke sedang	Teknosentrik
Politik Lingkungan (<i>Environmental politics</i>)	Ilmu Politik	Teori politik hijau (<i>Green political theory</i>), politik, negara, relasi antar negara	Lemah ke sedang	Teknosentrik
Sosiologi Lingkungan (<i>Environmental Sociology</i>)	Sosiologi	"menghijaukan" (<i>greening</i>) interaksi sosial dan sikap	Lemah	Ekosentrik
Ekologi Global (<i>Global Ecology</i>)	Ilmu Fisik dan Geografi	Perubahan lingkungan global	Lemah	Teknosentrik
Ekologi Manusia (<i>Human Ecology</i>)	Geografi	Pemahaman ilmu fisik dan sosial secara terpadu terhadap interaksi manusia-lingkungan	sedang	Ekosentrik
Ekologi Politik Dunia Ketiga (<i>Third World Political Ecology</i>)	Geografi	Ekonomi politik perubahan lingkungan		Ekosentrik

Sumber : Diringkas dari Bryant and Bailey (2001)

PENDEKATAN

Dalam kajian ekologi politik terdapat beberapa pendekatan yang berbeda satu lain dan tentu saja saling melengkapi. Ragam pendekatan tersebut muncul dari hasil riset dari berbagai ahli. Berdasarkan analisis terhadap berbagai riset yang dilakukan para ahli dalam kajian ekologi politik, Bryant dan Bailey (2001) memetakannya menjadi lima pendekatan yang terkait satu sama lain, yakni:

- a) Pendekatan yang bertumpu pada masalah lingkungan secara spesifik, yang pijakannya adalah perspektif atau bidang kajian *traditional geography* yang berkaitan dengan upaya memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik.
- b) Pendekatan yang bertumpu pada konsep yang terkait dengan pertanyaan ekologi politik, yakni mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep tersebut dikonstruksi. Analisis wacana nampaknya dominan dalam pendekatan ini. Seperti analisis terhadap wacana yang mendominasi sekitar konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka memperjelas asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat dan alam, serta ekonomi-politik yang membuat asumsi itu ada.
- c) Pendekatan yang melihat kaitan politik dengan masalah ekologis dalam konteks wilayah geografis tertentu, seperti kajian masalah lingkungan di Asia, Afrika, dan seterusnya.
- d) Pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi politik yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, gender, dan etnik
- e) Pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk fokus pada kepentingan, karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi.

Sementara itu Robbins (2004) telah mencoba mengidentifikasi empat tesis atau pendekatan dalam ekologi politik, yaitu:

- (a) Degradasi dan marjinalisasi; isunya perubahan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan yang kemudian menyebabkan kemiskinan.
- (b) Konflik lingkungan; isu akses lingkungan, yaitu adanya kelangkaan sumberdaya akibat pemanfaatan oleh negara, swasta, maupun elit sosial, yang kemudian mempercepat konflik antar kelompok (gender, kelas, maupun etnik).
- (c) Konservasi dan kontrol; konflik yang bersumber dari masalah konservasi, yang disebabkan oleh tercerabutnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya serta diabaikannya mata pencaharian dan organisasi sosial ekonomi mereka hanya karena demi konservasi.
- (d) Identitas lingkungan dan gerakan sosial; perjuangan sosial politik biasanya terkait dengan upaya mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.

Beberapa pendekatan di atas sebenarnya bersumber dari dua pendekatan, yaitu pendekatan aktor dan pendekatan kritis.

Pertama: Pendekatan Aktor

Pendekatan berpusat pada pelaku (*Actor Oriented* - AO) selama ini digunakan oleh Bryant and Bailey melalui buku *Third World Political Ecology* (2001). Pendekatan ini berpijak pada konsep *politicized environment* yang memiliki asumsi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi dimana masalah itu muncul. Jadi, masalah lingkungan bukanlah masalah teknis pengelolaan semata (Bryant and Bailey 2001). Ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan aktor ini, yaitu bahwa:

- a) Biaya dari manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata.
- b) Distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi.
- c) Dampak sosial ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan tersebut juga memiliki implikasi politik dalam arti bahwa terjadi perubahan kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan lainnya.

Karena pendekatan aktor berangkat dari asumsi bahwa perubahan lingkungan merupakan bentuk *politicized environment*, maka dimensi-dimensi *politicized environment* juga sangat penting dipahami. Dimensi-dimensi tersebut mencakup harian (*everyday*), episodik (*episodic*), dan sistemik (*systemic*), yang ketiganya memiliki karaktersitik dan dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Tabel 3 berikut ini akan mempermudah memahami dimensi-dimensi tersebut.

Tabel 3. Dimensi-dimensi *Politicized Environment*

Dimensi	Perubahan Fisik	Respon Politik	Konsep Kunci
Harian (<i>Everyday</i>)	Erosi tanah, deforestasi, salinisasi	Resistensi/protes masyarakat terkena dampak	Marjinalisasi
Episodik (<i>Episodics</i>)	Banjir, badai, kekeringan	Bantuan bencana	Kerentanan
Sistemik (<i>Systemic</i>)	Konsentrasi pestisida, GMO, nuklir	Ketidakpercayaan terhadap pakar/ahli	Risiko

Sumber: diringkas dari Bryant and Bailey (2001)

Ada lima aktor yang disorot Bryant dan Bailey (2001): yaitu negara, pengusaha, lembaga multilateral, LSM dan aktor akar rumput (*grass root*). Negara memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai aktor pengguna maupun pelindung sumberdaya alam, yang karenanya negara juga sering mengalami konflik kepentingan. Namun secara teoritis banyak kritik terhadap eksistensi negara ini. *Pertama*, bahwa negara mempersulit upaya memecahkan masalah lingkungan global, karena negara-negara di dunia ini berusaha untuk mengejar pembangunan ekonomi yang seringkali mengorbankan lingkungan. *Kedua*, bahwa negara juga tidak dalam kapasitas untuk memecahkan masalah lingkungan dalam berbagai *level*. Negara terlalu kecil untuk memecahkan masalah global, dan terlalu besar untuk memecahkan masalah lokal.

Sebenarnya kritik terhadap eksistensi negara tersebut terkait dengan tumbuhnya kapitalisme global. Negara merupakan aktor yang diharapkan menyediakan barang publik dari keamanan hingga infrastruktur sosial dan fisik. yang tanpa sistem kapitalis hal itu tidak akan terwujud karena sulitnya mengakumulasi kapital. Selain itu juga aktivitas industri banyak memaksimalkan ekstraksi sumberdaya yang akan diekspor ke negara maju, seperti timber, ikan, mineral, dan produk pertanian lainnya. Proses ini seringkali juga berdampak pada marginalisasi masyarakat yang dulunya punya akses terhadap sumberdaya tersebut. Juga, negara berusaha menarik *Multi Nasional Corporation* (MNC) untuk melakukan investasi di wilayahnya. Namun demikian di sekitar tahun 1980an, tekanan negara maju terhadap negara berkembang untuk mengkonservasi lingkungan semakin besar. Hal inilah yang membuat negara sedang berkembang menjadi serba salah.

Akan tetapi secara empiris, tidaklah terbukti bahwa antara kapitalisme dan negara selalu sejalan. Banyak konflik yang terjadi antar keduanya, seperti adanya kebijakan negara yang membatasi eksploitasi sumberdaya untuk kepentingan produksi jangka panjang, sementara para pengusaha punya keinginan sebaliknya. Termasuk upaya pembangunan infrastruktur fisik oleh negara tersebut - yang oleh pengkritik dianggap hanya akan menguntungkan kapitalisme - ternyata akan memudahkan negara melakukan fungsi kontrol.

Sementara itu aktor akar rumput (*grass roots actors*) merupakan pinak yang terlemah dalam *politized environment*. Aktor ini hampir selalu mengalami proses marginalisasi maupun rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan, yang bersifat setiap hari maupun episodik. Hal ini terjadi karena aktor-aktor lain seperti negara, pengusaha, maupun MNC memiliki kekuatan politik yang lebih besar dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam.

Kedua: Pendekatan Kritis

Kajian ekologi politik juga memfokuskan pada masalah *domination of nature* yang terkait dengan kajian kapitalisme sebagai penyebab utama degradasi lingkungan. Diskusi ini sebenarnya berlangsung sejak berkembangnya Tradisi Frankfurt dengan teori kritisnya, khususnya Marcuse dan Habermas, yang menggambarkan bagaimana sifat manusia yang didominasi rasionalitas instrumental dan sifat eksploitasi oleh masyarakat modern industrial. Inilah yang menggerakkan gerakan sosial baru di Eropa dan Amerika Utara tahun 1960an. Salah satu pemikiran Marcuse yang terkenal adalah tulisannya dalam *One Dimensional Man* yang di dalamnya secara eksplisit menegaskan bahwa dominasi terhadap alam terkait dengan dominasi sesama manusia (Forsyth 2003: 6). Ini terjadi karena manusia dan alam dilihat sebagai komoditi dan nilai tukar semata sehingga dehumanisasi menjadi tak terhindarkan dan begitu pula eksploitasi terhadap alam (Miller 1978 dalam Forsyth 2003: 6).

Perspektif *domination of nature* berkembang dan berusaha menggantikan perspektif *balance of nature* yang telah lebih dulu berkembang dan diterima sebagai sebuah

paradigma. Perspektif ini kemudian berkembang dan menjadi suatu pendekatan baru yang bersifat pasca-strukturalis (*post-structuralist*) untuk melengkapi pendekatan strukturalis yang sudah berkembang sebelumnya. Pendekatan strukturalis melihat persoalan degradasi lingkungan sebagai akibat dari kekuatan kapitalisme atau kebijakan negara yang opresif yang berdampak pada masyarakat lokal dan lingkungan. Sementara itu pendekatan pasca-strukturalis lebih menekankan pada pengaruh sejarah dan budaya terhadap evolusi konsep perubahan dan degradasi lingkungan sebagai kekuatan linguistik dan politik (Forsyth 2003: 8).

Dalam kajian pasca-strukturalis tersebut, perspektif *balance of nature*, *equilibrium ecology*, serta *environmental orthodox* merupakan sasaran kritik. Ada dua konsep yang dipertentangkan oleh perspektif pasca-strukturalis ini, yaitu konsep (baca: perspektif) *environmental orthodox* dan *environmental adaptation*. Singkat kata, kalangan ortodok banyak mengabaikan apa yang telah dilakukan masyarakat ladang berpindah, misalnya, dalam adaptasi perubahan lingkungan. Akhirnya mereka pun juga menganggap bahwa kaum ladang berpindah hanyalah menjadi sumber masalah lingkungan. Apa yang dikonseptualisasi kalangan ortodok, hingga saat ini sudah cukup mengakar dalam pemikiran lingkungan. Oleh karena itu upaya dekonstruksi terhadap mitos-mitos mereka saat melihat fenomena kemiskinan dan lingkungan juga perlu dilakukan. Tabel 4 merekam perbandingan perspektif ortodok dengan pemikiran baru yang lebih kritis.

Tabel 4 Mitos-Mitos dan Pemikiran Baru tentang Kemiskinan dan Lingkungan

Mitos	Pemikiran Baru
Kaum miskin menyebabkan kebanyakan kerusakan lingkungan	Secara umum orang kaya menggunakan sumberdaya lebih banyak dan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dari orang miskin
Kaum miskin tidak peduli terhadap lingkungan	Kaum miskin sangat sadar terhadap dampak negatif dari lingkungannya mengingat mereka sering tergantung pada lingkungan untuk hidup
Kaum miskin kurang memiliki pengetahuan dan sumberdaya untuk memperbaiki lingkungannya	Kaum miskin dapat melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, khususnya ketika insentif dan informasi tersedia. Namun sayangnya pengetahuan tradisional mereka seringkali diabaikan

Sumber : Forsyth (2003)

Atas dasar perkembangan pendekatan pasca-strukturalis tersebut, Forsyth (2003) merasa perlu mengembangkan *critical political ecology* yang menurutnya merupakan bentuk politik ekologi (*politics of ecology*) sebagai legitimasi ilmiah terhadap kebijakan lingkungan. Hal ini karena Forsyth melihat ada beberapa kelemahan dari berbagai pendekatan ekologi politik sebagaimana di atas, antara lain: karena pendekatan tersebut mengadopsi pendekatan apriori terhadap konsep ilmu lingkungan, dan juga karena dilihat langkahnya tidak cukup untuk menghindari pemisahan antara *environmental explanation and politics* dalam analisis politik

lingkungan.

Pemisahan antara prinsip politik dan prinsip ekologi akan sama-sama bermasalah. *Pertama*, kalau terlalu bertumpu pada politik maka kebijakan lingkungan tidak akan mampu menyentuh faktor biofisik dalam masalah lingkungan, sehingga menyebabkan kebijakan tidak akurat. *Kedua*, begitu juga sebaliknya kalau terlalu bertumpu pada prinsip lingkungan semata maka kebijakan lingkungan akan berdampak pada marginalisasi masyarakat lokal pengguna sumberdaya melalui pembatasan akses, yang berarti juga membatasi mata pencaharian masyarakat sehingga nampak tidak adil. Upaya untuk mengintegrasikan keduanya telah dilakukan Forsyth melalui dua instrumen, yakni "*science studies*" dan "*science policy*". *Science Studies* merupakan usaha untuk mengintegrasikan analisis politik terhadap konflik lingkungan dari sudut pandang filsafat dan sosiologi pengetahuan tentang lingkungan yang di dalamnya ilmu lingkungan dibuat. *Science policy* merupakan upaya memproduksi norma-norma ilmu pengetahuan dan politik dalam proses politik itu sendiri.

Terinspirasi perspektif *domination of nature*, tujuan dari *critical political ecology* adalah untuk:

- b) *Refocus political ecology from the assessment of capitalism alone as a source of environmental degradation, toward a politicized understanding of environmental explanation beyond the epistemology offered by the critique of capitalism.*
- c) *Present debates within political ecology with an approach to environmental politics that allows the successful integration of political analysis with the formation and dissemination of understandings of ecological reality.*

Selanjutnya Forsyth juga menjelaskan mengapa dia memberikan kata kritikal pada ekologi politik, sebagai berikut:

- a) *The objective to reach an emancipatory form of politics is consistent with the long term aim of Critical Theory, and its focus on knowledge and science as a product of oppressive regimes.*
- b) *The emphasis on science as both a means of explanation, but also rooted in politics reflects the concerns of so-called "critical science" or the reflexive attention of science to the political uses to which it may be put.*
- c) *Critical Political Ecology also adapts and expands insights from Critical realism, and associated debates such as semantic and so-called institutional approaches to explanation, that seek to blend epistemological skepticism with ontological realism.*

Ekologi Politik di Indonesia: Perspektif Otonomi Daerah²

Otonomi daerah (otda) kembali menjadi buah bibir publik. Banyak yang mengatakan bahwa otda sangat mengancam kelestarian lingkungan. Akibatnya, pemerintah pusat

hingga saat ini masih setengah hati dalam memberikan kewenangan. Lihat saja, Balai KSDA (Konservasi Sumberdaya Alam) yang tersebar di berbagai daerah masih merupakan perpanjangan tangan Departemen Kehutanan. Alasannya, untuk urusan konservasi daerah belum bisa dipercaya. Konservasi dianggapnya kepentingan nasional sehingga harus ditangani pusat. Kasus rencana reklamasi pantai Jakarta baru-baru ini dianggap merupakan bukti bahayanya urusan lingkungan diserahkan daerah. Namun tidak sedikit pula yang masih melihat sisi positifnya. Paling tidak dari sisi adanya ruang bagi partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumberdaya alam. Lalu, bagaimana kita mesti mencermati fenomena ini?

Memang dari sudut ekologi politik ada semacam premis bahwa perubahan lingkungan bukanlah merupakan proses yang netral-teknis, tetapi lebih merupakan proses politik dari aktor-aktor yang terkait dengan kepentingan sumberdaya alam. Jadi, perubahan lingkungan merupakan bentuk *politicized environment*. Sehingga, kerusakan lingkungan sepanjang Orde Baru maupun pasca reformasi – dengan meminjam kerangka Bryant (2000) – dapat dilihat dari sumber politik (*political resources*), kondisi (konflik aktor), serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Pada masa lalu, sumber politiknya mencakup kebijakan pemanfaatan sumberdaya yang coraknya sentralistik. Sentralisme tersebut merupakan warisan kolonial yang gayung bersambut dengan proyek modernisme dengan tumbuhnya nilai-nilai antroposentrisme dan teknokratisme. Di tambah lagi kapitalisme global yang berkembang sejak penjajahan juga makin kuat dan deterministik terhadap ancaman kerusakan sumberdaya suatu negara. Corak sentralistiknya terlihat dari mekanisme perijinan pemanfaatan sumberdaya. Semua harus dari pusat. Pusatlah seolah merasa paling tahu (baca: ada monopoli pengetahuan dan kebenaran), sehingga hal-hal yang berbau lokal dan tradisional disingkirkan. Tentu, konflik sebagai bentuk perlawanan rakyat terus mengemuka. Namun akhirnya, institusi lokal (misal hak ulayat) – yang sebenarnya penuh kearifan lokal – pudar. Lalu, masyarakat menjadi “tamu” di rumahnya sendiri dengan “tuan rumah” baru yang berasal dari pemilik modal Jakarta. Akibatnya, ketimpangan pun tak bisa dihindari lagi. Ini tidak saja kasus di kehutanan, tetapi juga di kelautan.

Disinilah, otonomi daerah yang mengamanatkan sebuah proses desentralisasi memiliki relevansi dan justifikasi yang kuat, yakni, sebagai lingkungan strategis baru yang akan menciptakan sumber politik baru, yang antitesis terhadap paradigma dan strategi masa lalu yang sentralistik, antroposentrik, dan teknokratik. Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) lalu menjadi desentralistik dan berbasis pada paradigma ekosentrisme. Ekosentrisme mengandaikan suatu asumsi bahwa relasi manusia dan alam bukanlah relasi dominasi, tetapi relasi kesetaraan. Artinya, ada perlakuan etik manusia terhadap eksistensi alam (*non-human*). Relasi moral antara manusia dengan alam sebenarnya telah banyak berkembang pada institusi lokal-tradisional. Karena itu, kepercayaan pada institusi yang kaya akan kearifan nilai lokal ini merupakan suatu keniscayaan, dan

desentralisasi adalah mekanisme penyerahan kepercayaan itu. Dengan demikian, proses pembangunan akan kembali bertumpu pada kekuatan rakyat yang sarat akan energi dan modal sosial, sehingga demokratisasi pun akan tercipta karena jarak sosial pengambil kebijakan dan sasaran kebijakan semakin dekat. Pengambil kebijakan akan merasakan langsung produk kebijakannya sehingga ia mesti hati-hati dan mendengar apa kata rakyat. Rakyat tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta hanya untuk protes atau memberi masukan. Sebaliknya pada masa lalu, pengambil kebijakan ada di Jakarta padahal sasarannya ada jauh di luar Jakarta, sehingga para pengambil kebijakan tidak merasakan hasil kebijakannya, sementara masyarakat lokal yang menerima dampak kebijakan itu. Sedangkan untuk melakukan aksi protes, masyarakat lokal juga mengalami kesulitan, dikarenakan harus datang ke Jakarta. Penentuan ijin HPH dari Jakarta, misalnya, jarang memperhatikan hak-hak adat masyarakat sekitar hutan. Penentuan ijin budidaya mutiara tidak mempedulikan eksistensi *common property right* yang di dalamnya sarat dengan aturan-aturan lokal-tradisional dan sejumlah hak-hak sebagaimana diidentifikasi Ostrom (1990).

Namun apakah asumsi desentralisasi seperti itu realistis? Bagaimana dengan kasus reklamasi pantai Jakarta, penambangan pasir laut di Kepulauan Riau (Kepri), dan kasus kerusakan lingkungan lain akibat otda? Sebagai ilustrasi, sebelum pemberlakuan otda, jumlah perusahaan yang melakukan penambangan pasir hanya sekitar 10 perusahaan di Kepri dan anehnya setelah Otda membengkak menjadi 140 perusahaan, dan konon hanya 2 perusahaan yang memiliki AMDAL. Karena itu, diakui bahwa kinerja desentralisasi belum memuaskan. Hal ini karena memang ada asumsi yang terlewat dalam formulasi kebijakan desentralisasi, yakni asumsi bahwa desentralisasi mensyaratkan berdayanya *civil society* di daerah. Kenyataannya *civil society* di daerah masih belum bisa setara dalam interaksi politik dengan pemerintah daerah dan DPRD (*political society*). Akibatnya, meski jarak sosial antara *state* dan *civil society* dekat, ternyata tidak membuahkan kebijakan yang aspiratif. Sebaliknya negara malah cenderung akomodatif terhadap penetrasi modal dari luar yang seringkali kontra-produktif dengan misi keadilan, kesejahteraan, dan sustainability sumberdaya. Ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) akhirnya menjadi sumber *political driven* baru. Jadi, meski terjadi perubahan sistem ke arah desentralistik, ternyata masih ada ciri imanen (*immanent change*) yang mencolok, yaitu bahwa sumber politik baru berciri sama dengan yang lama. Dengan kata lain yang terjadi hanyalah pergantian aktor dan skala. Apakah kemudian desentralisasi harus dicabut?

Kalangan yang pro desentralisasi sebenarnya terpecah menjadi dua. Yakni, yang senang karena mendapat kewenangan baru (pragmatis), serta yang senang karena percaya pada asumsi-asumsi ideal desentralisasi itu (idealis). Umumnya pemerintah daerah (Pemda) cenderung pragmatis, sementara kalangan *civil society* (LSM dan akademisi) cenderung idealis. Namun, pertarungan pragmatisme versus idealisme tersebut bukanlah menjadi dasar untuk mencabut desentralisasi untuk re-sentralisasi. Desentralisasi secara *taken for granted* atau pencabutan desentralisasi untuk

re-sentralisasi bukanlah sebuah pilihan. Melainkan merupakan dua fakta ekstrim yang sama-sama bahayanya. Dari dua fakta ini sebenarnya ada ruang vakum yang benar-benar vakum pasca UU Pemerintah Daerah. Ruang vakum tersebut adalah transisi desentralisasi. Masa transisi tiga tahun lalu ternyata tidak dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan koridor, menyusun rambu-rambu, prosedur, dan mekanisme implementasi desentralisasi. Sehingga, pragmatisme Pemda saat ini merupakan sikap kreatif Pemda sekaligus merupakan produk "*blunder*"nya pusat yang membiarkan daerah melakukan "ijtihad" untuk implementasi desentralisasi. Sangatlah tidak bijak bila pemerintah pusat lalu mengusulkan re-sentralisasi, karena pusat pun punya andil dalam membuat desentralisasi amburadul.

Dengan kondisi yang demikian, sembari perlu diciptakan koridor dan rambu-rambu desentralisasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan seterusnya, dua hal yang justru penting. Yakni, memberikan kekuatan hukum pada berbagai bentuk institusi lokal yang terbukti memiliki nilai kearifan untuk menjaga keberlanjutan. Bagaimanapun masyarakat telah terbukti banyak memberi kontribusi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, meski tak mendapat tempat selama rezim sentralistik. Namun langkah ini cocok untuk skala pengelolaan yang relatif kecil (tingkat komunitas). Ketika skala pengelolaan lebih besar, perlu pengembangan bentuk *collaborative management*. Bentuk kolaborasi ini memungkinkan seluruh *stakeholder* duduk bersama menciptakan model pengelolaan. Ketika masyarakat sudah mampu mengelola SDA dan lingkungan sendiri, sebenarnya justru semakin meringankan tugas Pemda. Jadi, saat ini desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola SDA mesti mendapat porsi perhatian lebih dari sekedar desentralisasi dalam arti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Devolusi kekuasaan kepada masyarakat memang kurang menonjol pada UU Pemerintah Daerah. Karena itu, model ini perlu menjadi babak baru dalam desentralisasi pengelolaan SDA dan lingkungan di era otonomi daerah ini.

PENUTUP

Ekologi politik memang merupakan hasil evolusi dari teori-teori ekologi sebelumnya. Pendekatan ekologi politik saat ini telah dipandang sebagai pendekatan yang sangat penting dalam memahami kompleksitas persoalan lingkungan serta penting pula sebagai pijakan dalam formulasi kebijakan lingkungan. Tulisan ini telah mencoba mengantarkan sejarah, konsep dasar, serta pendekatan-pendekatan dalam ekologi politik. Tentu, tulisan ini tidak berpretensi untuk mengungkapkan seluk-beluk ekologi politik secara rinci. Perkembangan riset dan teori ekologi politik yang semakin luas, tentu sulit untuk dicakup semuanya dalam tulisan ini. Namun demikian, setidaknya pengantar ini bisa membuka wawasan baru betapa persoalan lingkungan dan sumberdaya alam tidak semata teknis, melainkan juga sosial-politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, L. Raymon, and Sinead Bailey (2000) *Third world Political Ecology*. Routledge. London and New York.
- Forsyth T. (2003) *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge. London.
- Ostrom, Elinor (1990) *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Robbins P. (2004) *Political Ecology: Critical Introductions to Geography*. Blackwell Publishing. Oxford.
- Satria, A. and Matsuda, Y. (2004a) *Decentralization of Fisheries Management in Indonesia*. Marine Policy (Elsevier) , 28, 361-450.
- Satria, A. and Matsuda, Y. (2004b) *Decentralization Policy: An opportunity for strengthening fisheries management system?*. Journal of Environment and Development (Sage Publication), Volume 13, Number 2, 179-196.
- Satria, A, Matsuda, Y, Sano, M. (2006a) *Questioning Community-Based Coral Reef management Systems: Case Study of Awig-Awig in Gili Indah, Indonesia*. Journal of Environment, Development, and Sustainability (Springer). Vol 8, 99-118.
- Satria, A, Sano M, and Shima H. (2006b) *Politics of Marine Conservation Area: From A Centralized to a Decentralized System*. Journal of Environment and Sustainable Development (Inderscience) (in press).

¹ Kajian tentang hal tersebut lebih dalam bisa dilihat pada Satria et al (2004a): Satria et al (2004b): Satria et al (2006a): dan Satria et al (2006b).

² Direvisi dari naskah penulis yang pernah dimuat di Majalah Mingguan Gatra 12 Juli 2003.